

OPTIMALISASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

DICKY AGENG ARISTYONO

NPP. 32.0429

*Asdaf Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: 32.0429@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ahmad Ripa'i, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Despite digital transformation being a national priority, the implementation of the Digital Identity Card (IKD) program in Rembang Regency still faces obstacles such as uneven internet coverage, low digital literacy among the community, and suboptimal utilization of IKD in public services. Activation has only reached 1.36%, far below the average for Central Java Province. **Purpose:** To analyze the optimization of DNI activation by the Population and Civil Registration Office of Rembang District. **Method:** Using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation, with analysis based on three dimensions of optimization according to Mardiasmo: output, outcome, and impact. **Results:** The output dimension shows good readiness of human resources, procedures, and infrastructure. However, outcomes and impacts remain low due to minimal community participation and the absence of long-term effects. Major challenges include low public awareness, technological limitations, and weak inter-agency integration. **Conclusion:** The optimization of IKD in Rembang Regency has not been fully realized. While output has been effectively achieved, outcomes and impacts require improvement through a more comprehensive and sustainable approach.

Keywords: Digital Population Identity, IKD Activation, Population Administration, Disdukcapil, Rembang District.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun transformasi digital menjadi prioritas nasional, pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rembang masih menghadapi hambatan seperti jaringan internet yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan IKD dalam layanan publik. Capaian aktivasi baru mencapai 1,36%, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. **Tujuan:** Untuk menganalisis optimalisasi aktivasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis berdasarkan tiga dimensi optimalisasi menurut Mardiasmo: output, outcome, dan impact. **Hasil:** Dimensi output menunjukkan kesiapan SDM, prosedur, dan sarana prasarana yang baik. Namun, outcome dan impact masih rendah karena partisipasi masyarakat minim dan dampak jangka panjang belum terlihat. Hambatan utama meliputi kesadaran masyarakat

yang rendah, keterbatasan teknologi, dan lemahnya integrasi antarinstansi. **Kesimpulan:** Optimalisasi IKD di Kabupaten Rembang belum berjalan optimal. Hanya pencapaian output yang terlaksana dengan baik, sedangkan outcome dan impact masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Aktivasi IKD, Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, Kabupaten Rembang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan teknologi dalam kegiatan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan sangat diperlukan agar pelayanan menjadi efisien (Hutasoit et al. 2024). Pemerintah daerah diminta untuk membangun sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan arah kebijakan nasional tentang transformasi digital. Salah satu cara untuk modernisasi pelayanan publik adalah dengan menggunakan teknologi digital, yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan digital. Pemerintahan Digital ini menghadirkan peluang yang signifikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Giroth, Purnomo, Dotulong, Mokoginta, & Pusung, 2024). Digitalisasi layanan publik di Kabupaten Rembang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat 10 layanan publik di Kabupaten Rembang yang telah terdigitalisasi. Meskipun data menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam transformasi digital pelayanan publik, tingkat digitalisasi masih perlu untuk ditingkatkan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan berbasis digital semakin meningkat. Salah satu prioritas digitalisasi layanan publik yang sedang dikembangkan adalah program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelaksanaan program IKD terkendala oleh infrastruktur jaringan yang belum merata. Data BPS Kabupaten Rembang (2022) menunjukkan terdapat 25 desa yang masih menggunakan jaringan 3G dan 1 desa hanya memiliki akses jaringan 2,5G. Menurut data urgent.id, kecepatan internet rata-rata desa terpencil yang berada di Kecamatan Sedan hanya 1 Mbps, jauh di bawah standar yang dibutuhkan untuk mengakses layanan digital. Tantangan aktivasi IKD semakin kompleks karena kondisi geografis Kabupaten Rembang yang memiliki luas wilayah 1.036,70 Km², dengan sebagian besar (56,83%) merupakan dataran rendah (BPS Kabupaten Rembang, 2022). Karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir di bagian utara dan perbukitan di bagian selatan, menciptakan kendala tersendiri dalam melakukan aktivasi. Pada wilayah perbukitan, tantangan utama berupa kesulitan pembangunan infrastruktur digital yang berdampak pada ketidakmerataan kualitas sinyal dan kecepatan internet.

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN KTP	JUMLAH IKD	CAPAIAN
1	CILACAP	1.550.114	86,995	5,61%
2	BANYUMAS	1.418.319	84,772	5,98%
3	PURBALINGGA	781,803	33,256	4,25%
4	BANJARNEGARA	796,866	57,199	7,18%
5	KEBUMEN	1.082.554	93,603	8,65%
6	PURWOREJO	622,905	48,981	7,86%
7	WONOSOBO	702,556	30,776	4,38%
8	MAGELANG	1.019.781	44,942	4,41%
9	BOYOLALI	828,198	44,378	5,36%
10	KLATEN	999,775	41,054	4,11%
11	SUKOHARJO	690,721	30,263	4,38%
12	WONOGIRI	836,54	109,166	13,05%
13	KARANGANYAR	714,943	21,685	3,03%
14	SRAGEN	770,24	15,083	1,96%
15	GROBOGAN	1.137.632	44,17	3,88%
16	BLORA	713,89	18,614	2,61%
17	REMBANG	502,503	6,83	1,36%
18	PATI	1.057.352	64,234	6,07%
19	KUDUS	648,235	24,854	3,83%
20	JEPARA	942,344	53,737	5,70%
21	DEMAK	894,65	21,987	2,46%
22	SEMARANG	816,974	50,314	6,16%
23	TEMANGGUNG	620,015	177,798	28,68%
24	KENDAL	824,643	66,085	8,01%
25	BATANG	628,887	45,558	7,24%
26	PEKALONGAN	747,686	13,936	1,86%

27	PEMALANG	1.168.228	52,385	4,48%
28	TEGAL	1.264.705	31,666	2,50%
29	BREBES	1.499.878	27,554	1,84%
30	KOTA MAGELANG	99,877	30,63	30,67%
31	KOTA SURAKARTA	450,7	75,417	16,73%
32	KOTA SALATIGA	147,217	4,644	3,15%
33	KOTA SEMARANG	1.260.760	49,816	3,95%
34	KOTA PEKALONGAN	227,795	6,666	2,93%
35	KOTA TEGAL	210,185	6,015	2,86%
	TOTAL	28.679.471	1.615.063	5,63%

Data pada di atas menunjukkan bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Rembang masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu jumlah persentase 1,36% dari total penduduk yang telah terdaftar wajib KTP-el. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala yang signifikan dalam aktivasi IKD di Kabupaten Rembang. Dengan mengadopsi dan mengadaptasi strategi yang tepat, diharapkan Kabupaten Rembang dapat mencapai target nasional dalam aktivasi IKD.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi agenda prioritas nasional dan Kabupaten Rembang menunjukkan komitmen melalui digitalisasi 10 layanan publik, namun kenyataannya implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi hambatan signifikan. Gap permasalahan muncul antara arah kebijakan digital government yang menuntut pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan kondisi faktual di lapangan yang belum sepenuhnya mendukung. Infrastruktur jaringan yang belum merata, khususnya di wilayah-wilayah perbukitan dan terpencil, menjadi kendala utama yang menyebabkan rendahnya tingkat aktivasi IKD. Kecepatan internet yang jauh di bawah standar dan keterbatasan akses jaringan modern (masih terdapat desa dengan jaringan 2,5G dan 3G) menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Rembang yang luas dan beragam menambah kompleksitas tantangan dalam penyediaan layanan digital yang merata. Hal ini tercermin dari rendahnya capaian aktivasi IKD yang baru mencapai 1,36% dari total penduduk wajib KTP-el, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ekspektasi nasional terhadap modernisasi pelayanan publik berbasis digital dan realitas implementasi di daerah, khususnya dalam konteks kesiapan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap layanan IKD.

1.3 Penelitian Terdahulu

1. Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) dalam mendorong digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa Desa Jepara telah melakukan semua proses aktivasi sesuai prosedurnya yang telah ditentukan. Namun, agar meningkatkan atau melebihi kinerja terkait, harus dilakukan upaya sosialisasi berkelanjutan agar meningkatkan kemajemukan warga.

2. Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menyatakan bahwa Disdukcapil, sebagaimana instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan, memiliki kesiapan cukup melaksanakan identitas kependudukan digital. Layanan berkenaan dengan identitas kependudukan digital dapat diintegrasikan dengan inovasi layanan telah ada dan diselenggarakan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung. Seiring dengan tingkat kemampuan dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi smartphone beragam, maka perlu diupayakan sosialisasi dan edukasi secara.
3. Romawati, A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo. Pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa magang MSIB Batch 5 berkontribusi terhadap meningkatnya cakupan aktivasi aplikasi IKD.
4. Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. Hasilnya adalah setelah adanya pendamping aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya merupakan salah satu usaha dalam meraih pelayanan yang lebih mudah dan lebih cepat demi terciptanya good government serta berorientasi kepada unsur-unsur kepentingan masyarakat saja serta meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya Identitas Kependudukan Digital.
5. Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. hasilnya menyatakan adanya beberapa perkembangan positif dalam efektifnya Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Kandangan, Kota Surabaya. Ada peningkatan antusias warga dalam mengaktifkan IKD sebagai contoh partisipasi aktif terhadap layanan digital. Selain itu, dukungan Kepala Desa Kandangan, para Ketua RT dan RW, serta Tim Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya juga terlibat penting dalam halnya melalui aktivitas sosialisasi berintensif kepada masyarakat. Seiring itu, warga Desa Kandangan mulai secara progresif bertransisi dari pemakaian KTP fisik menuju KTP digital, dengan tujuan agar lebih mudah dan lebih akurat pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan program ini pun diawasi secara berkala oleh Tim Desa Kandangan serta dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagai suatu bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap keberlangsungan dan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan kondisi terkini dan melibatkan informan yang lebih beragam serta luas cakupannya. Kesenjangan penelitian yang diangkat merupakan isu spesifik yang hanya muncul di lokasi penelitian, yaitu mengenai Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada penerapan teori optimalisasi dengan indikator tertentu yang dirumuskan secara spesifik, sehingga menghasilkan temuan yang berbeda dari studi-studi sebelumnya.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aktivasi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna dan penyelenggara dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi kendala dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Rembang

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah menggunakan data yang bersifat naratif dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjadikan penulis sebagai instrumen utama, dengan tujuan menetapkan fokus penelitian dan memilih informan dari berbagai sumber data (Rukajat, 2018). Metodologi yang tidak tepat atau salah akan membuat penelitian tidak dapat diterima dan bahkan dapat memberikan informasi yang salah (Garg, 2016). Menurut Nurdin dan Hartati (2019), metode kualitatif kadang-kadang disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Metode ini juga dikenal sebagai metode etnografis dan awalnya digunakan dalam studi antropologi. Menurut Crowther dan Lauesen (2017), penelitian kualitatif menggunakan bahasa yang sederhana, meminimalkan sampel kecil yang dikumpulkan secara sengaja atau oportunistik, dan fokus pada individu, studi, atau konteks yang menjadi objek penelitian. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus-kasus tertentu. Moleong (2005:6) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang terkait dengan analisis partisipan, seperti persepsi, motivasi, dan tindakan, yang diteliti secara mendalam dalam konteks yang dapat dipahami menggunakan deskripsi tertulis dan lisan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kondisi lapangan dengan tenang guna menemukan solusi bagi masalah yang diteliti. Setiap peneliti diharapkan bekerja dengan tekun dan akurat di setiap fase penelitian. Secara umum, menurut Sugiyono (2019), metode penelitian adalah proses penggunaan data yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan hal baru, mendukung hipotesis, atau mengembangkan konsep yang sudah ada. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengevaluasi berbagai perspektif. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif memerlukan berbagai jenis data, termasuk hasil wawancara, data lapangan, dokumen, foto, dan data sekunder lainnya. Fokus utama penelitian ini, menurut Simangunsong (2017:192), adalah pada makna penelitian. Akibatnya, makna dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat subjektif dan beragam, tergantung pada pengalaman masing-masing peserta. Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah penggunaan instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Menurut Bhaskar dan Manjuladevi (2016), alat penelitian seperti formulir observasi, formulir wawancara, dan kuesioner merupakan alat yang berguna untuk mengumpulkan data yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan pengukuran terhadap Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan menerapkan konsep optimalisasi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:145-146). Menurut Mardiasmo, optimalisasi melibatkan tiga elemen utama, yaitu:

1. Pencapaian Output

2. Pencapaian Outcome
3. Pencapaian Impact

3.1 Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Pada Dimensi Pencapaian output dalam kegiatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam hal sumber daya manusia, prosedur pelayanan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Setiap operator telah mengikuti pelatihan yang diawasi oleh pemerintah provinsi dan didasari oleh pengetahuan teknis dan prosedur yang sesuai dengan SOP. Kegiatan IKD yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan prinsip pelayanan publik, menawarkan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses registrasi. Masyarakat umum juga menilai bahwa proses pelayanan sudah cukup baik dan mudah dipahami. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada infrastruktur jaringan dan teknologi, terutama di daerah-daerah kecil, yang mempengaruhi efektivitas program produksi bola. Berbagai inovasi telah dilakukan, seperti pelatihan berkelanjutan, pemeliharaan sistem, dan pengembangan strategi penyampaian layanan secara mobile untuk meningkatkan kualitas layanan. Secara keseluruhan, keberhasilan output ini menjadi fondasi penting untuk mengoptimalkan kegiatan IKD di Kabupaten Rembang.

Pada dimensi outcome, hasil kegiatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rembang masih belum maksimal. Meskipun sudah ada upaya serius dari Disdukcapil dan instansi pemerintah lainnya untuk mendorong penggunaan IKD, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aktivitas masyarakat secara umum masih cukup rendah. Hingga Januari 2025, aktivitas perekaman baru mencapai 1,46% dari total wajib KTP-el, masih jauh dari target nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kenyataan di masyarakat. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat KTP-el dan belum optimalnya penggunaan KTP-el di sektor publik. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat IKD, sehingga tidak termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan. Selain itu, penggunaan IKD di berbagai institusi pendidikan tinggi tidak konsisten, yang berarti masyarakat tidak menganggap IKD sebagai kebutuhan praktis. Selain itu, kesadaran di lingkungan pemerintahan sudah cukup baik. ASN dan institusi lain di Kabupaten Rembang telah aktif mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan IKD. Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah membentuk komite melalui kolaborasi antar organisasi dan partisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, sentimen masyarakat masih cukup rendah, dan hal ini menjadi faktor utama belum tercapainya hasil yang diinginkan.

Dari dimesi Impact, dampak program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa, meskipun hasilnya masih agak terbatas, hasilnya masih terlihat dalam jangka panjang sebagai hasil sampingan dari proses transformasi administrasi. Kegiatan IKD mengalami sedikit peningkatan, meskipun tidak signifikan secara statistik dan masih di bawah target nasional sebesar 30%. Hingga Januari 2025, persentase kegiatan baru mencapai 1,49% dari seluruh wajib KTP-el. Peningkatan ini tetap mencerminkan adanya pergeseran menuju digitalisasi administrasi kependudukan, namun hasil jangka panjangnya masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Fokus utamanya adalah pada kondisi literasi digital, infrastruktur di wilayah terkecil, dan efektivitas sosialisasi. Sayangnya, masyarakat umum belum sepenuhnya memahami manfaat praktis IKD dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat partisipasi dalam kegiatan cukup rendah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan komitmen strategis dengan

menerapkan ASN, memastikan pemberian layanan melalui program jemput bola, dan mengidentifikasi target kegiatan. Penerapan kebijakan telah ditetapkan untuk menetapkan IKD sebagai komponen pelayanan publik, namun implementasi di lapangan masih dalam tahap awal dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, dampak jangka panjang dari kegiatan IKD akan lebih terasa jika ada penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, baik dari aspek teknis, regulasi, maupun sosial masyarakat. Perlu adanya integrasi lintas sektoral, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar program IKD dapat secara efektif meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.

3.2 Faktor Penghambat Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang

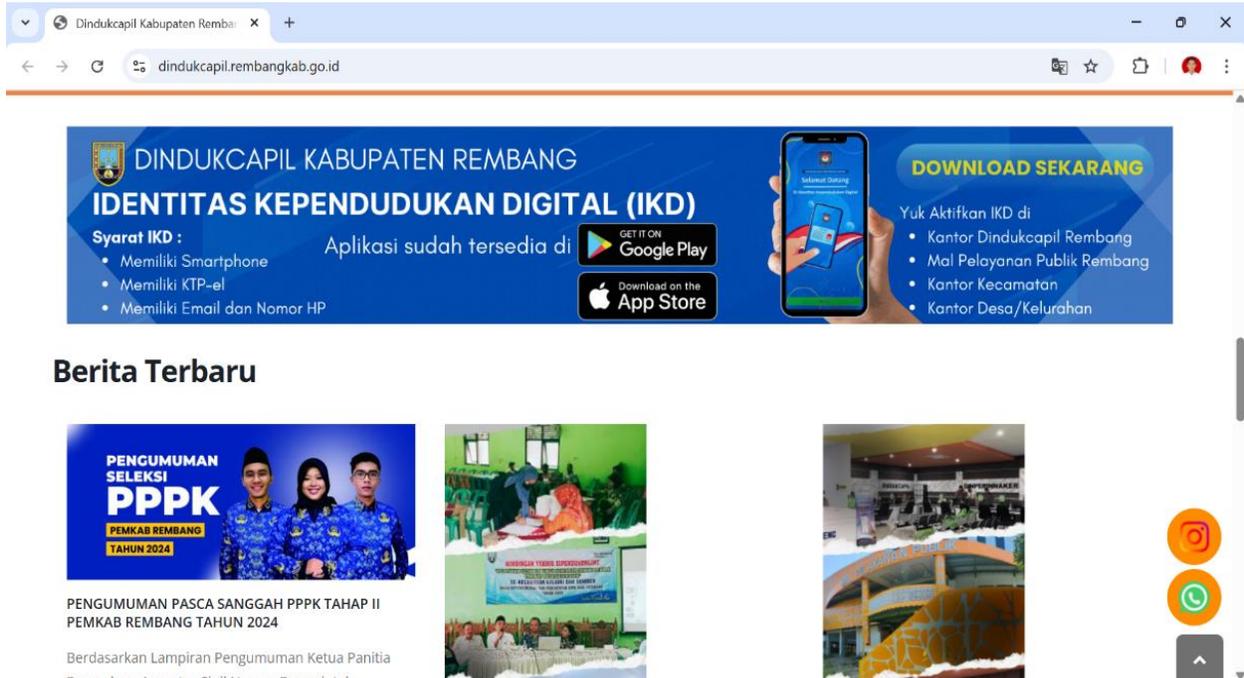
Penyelenggaraan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rembang masih menghadapi sejumlah kendala signifikan yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi. Hambatan tersebut bersifat struktural, teknis, maupun sosial, yang secara keseluruhan menurunkan efektivitas implementasi program di tingkat masyarakat. Pertama, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi hambatan utama. Sosialisasi yang belum merata membuat sebagian besar warga, khususnya yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kesibukan tinggi, tidak mengetahui keberadaan maupun manfaat IKD. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi sangat rendah. Kedua, keterbatasan literasi digital dan teknologi juga menjadi faktor penghambat. Banyak warga, termasuk ASN berusia di atas 40 tahun, masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan smartphone dan memahami proses aktivasi IKD. Versi perangkat yang tidak mendukung, minimnya ruang penyimpanan, serta ketergantungan pada aplikasi lain membuat masyarakat enggan mengunduh aplikasi IKD. Ketiga, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, seperti infrastruktur jaringan internet yang belum merata, terutama di daerah pedesaan dan perbukitan. Hal ini menyulitkan program jemput bola yang dijalankan oleh Disdukcapil, serta memengaruhi stabilitas layanan saat pelaksanaan aktivasi. Keempat, minimnya integrasi kelembagaan dan dukungan dari institusi layanan publik juga menjadi hambatan serius. Belum adanya surat edaran resmi yang mewajibkan penggunaan IKD di sektor layanan, seperti perbankan, kesehatan, dan pendidikan, membuat masyarakat belum merasa kebutuhan mendesak untuk mengaktifkan IKD.

3.3 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi kendala dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Strategi yang diterapkan berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, integrasi sistem pelayanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang.

Pertama, Disdukcapil meningkatkan sosialisasi secara berjenjang dengan melibatkan stakeholder lokal, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga tokoh masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, serta membangun pemahaman kolektif tentang manfaat dan prosedur aktivasi IKD. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, media massa, papan informasi, dan forum-forum kemasyarakatan dengan tujuan untuk memperluas dan lebih beragam. Pendekatan yang dilakukan oleh Disdukcapil kabupaten Rembang bertujuan untuk memanfaatkan platform digital yang pastinya hampir semua

kalangan menggunakan media sosial dan website. Adapun contoh sosialisasi melalui website resmi Disdukcapil Kabupaten Rembang Mengenai sosialisasi IKD:



Dari gambar di atas memperlihatkan informasi terkait aplikasi IKD yang Ikd yang kini dapat diunduh oleh pengguna iOS, setelah sebelumnya hanya tersedia di platform Android. Hal tersebut berarti semakin mudahnya masyarakat kabupaten rembang untuk melakukan aktivasi IKD karena kini aplikasi dapat menjangkau semua jenis smartphone.

Kedua, dilakukan integrasi layanan antara IKD dan pelayanan KTP elektronik serta Mall Pelayanan Publik (MPP). Strategi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat mengaktifkan IKD bersamaan dengan pengurusan dokumen lainnya, sehingga lebih efisien secara waktu dan tenaga. Selain itu, kehadiran Disdukcapil dalam kegiatan jemput bola ke OPD, sekolah, perguruan tinggi, dan acara publik seperti Car Free Day, menjadi langkah nyata untuk memperluas jangkauan layanan.

Ketiga, pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana juga menjadi perhatian Disdukcapil. Pengecekan rutin terhadap hardware, software, dan jaringan dilakukan untuk mencegah kendala teknis. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan berkala untuk memastikan aparatur memahami sistem pelayanan digital dan dapat menangani kendala teknis selama proses aktivasi berlangsung.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa meskipun capaian aktivasi masih rendah, terdapat upaya yang cukup signifikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini mencakup pencapaian output yang baik dalam aspek kesiapan SDM dan prosedur pelayanan, tetapi belum diikuti oleh outcome dan impact yang optimal karena kendala infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan rendahnya integrasi kelembagaan.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Widiyarta & Humaidah (2023) yang menyoroti pentingnya sosialisasi berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan aktivasi IKD. Di Kabupaten Rembang, sosialisasi juga menjadi salah satu fokus utama dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat. Begitu pula dengan penelitian Sasongko (2023) di Kabupaten Bandung yang menekankan perlunya kesiapan institusional dan pemahaman masyarakat sebagai kunci keberhasilan. Di Rembang, permasalahan literasi digital masyarakat dan perbedaan kemampuan teknologi menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, Romawati et al. (2024) menunjukkan bahwa pelibatan mitra, seperti mahasiswa magang, dapat membantu meningkatkan cakupan aktivasi IKD. Hal serupa belum dimaksimalkan di Kabupaten Rembang, sehingga pendekatan kemitraan strategis seperti ini dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, penelitian Zafira & Hertati (2023) menekankan bahwa pendampingan aktivasi IKD secara langsung dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga. Hal ini mendukung hasil temuan penelitian ini, bahwa program jemput bola dan layanan terpadu sangat efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Lebih lanjut, Firmansyah & Anisykurlillah (2023) dalam penelitiannya di Kelurahan Kandangan, Surabaya, menemukan bahwa keberhasilan IKD sangat dipengaruhi oleh dukungan lintas aktor, mulai dari kepala desa hingga tim Disdukcapil. Temuan ini juga diperkuat dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi di Kabupaten Rembang menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan IKD, meskipun belum merata di semua wilayah.

Secara umum, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada keterlibatan sosial, strategi komunikasi, dan dukungan kelembagaan. Penelitian ini memperkuat hasil-hasil sebelumnya sekaligus menambah perspektif baru dalam konteks geografis yang lebih menantang, seperti Kabupaten Rembang, yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan karakteristik wilayah yang beragam.

IV. KESIMPULAN

Meskipun pencapaian output sudah terlihat, pencapaian outcome dan impact masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD belum optimal karena keterbatasan literasi digital, infrastruktur jaringan yang belum merata, serta kurangnya pemanfaatan IKD dalam layanan publik sehari-hari. Hal ini menjadi faktor penghambat utama penyelenggaraan IKD di daerah tersebut. Berbagai hambatan yang ditemukan, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan, telah direspons oleh Disdukcapil melalui sejumlah upaya strategis. Upaya tersebut meliputi peningkatan intensitas sosialisasi, kolaborasi antarinstansi, pemeliharaan sistem, serta pemetaan wilayah prioritas. Secara keseluruhan, keberhasilan program IKD sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan sistem, dukungan kebijakan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi dan berbasis lokal dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan di tingkat daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama, yaitu waktu dan biaya; keterbatasan ini membatasi kemampuan peneliti untuk memperluas cakupan data dan melakukan analisis yang lebih mendalam tentang temuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sehingga penulis menyampaikan untuk dilakukan penelitian lanjutan di tempat yang sama yang menggeluti tema Optimalisasi

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berperan aktif dalam menyukseskan proses pelaksanaan penelitian ini.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Bhaskar, S. B., & Manjuladevi, M. (2016). Methodology for research II. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 646–651. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190620>
- Crowther, D., & Lauesen, L. M. (2017). Qualitative methods. *Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility*, 225–229. <https://doi.org/10.4324/9781315672632-5>
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510-517. [Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan](https://doi.org/10.30605/jiw.v9i19.12345)
- Garg, R. (2016). Methodology for research I. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 640–645. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190619>
- Giroth, L. G. J., Purnomo, K. D. M., Dotulong, F., Mokoginta, D., & Pusung, P. H. (2024). Konsep, Urgensi dan Strategi Pembangunan Literasi Digital. *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.57119/litdig.v2i2.105>
- Hutasoit, Imelda. 2017. Pengantar Ilmu Kependudukan. Bandung: Bandung: Alfabeta Mantra.
- Mardiasmo. 2018. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Romawati, A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 49-56. [Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital \(IKD\) di Kelurahan Wonorejo | Journal Of Human And Education \(JAHE\)](https://doi.org/10.30605/jahe.v4i1.12345)
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approaches. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(3148), 69-86. [IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANDUNG - ipdn Repository](https://doi.org/10.30605/jr.v5i3148.12345)
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) dalam mendorong digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51. [Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital \(Ikd\) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan](https://doi.org/10.30605/jiw.v9i18.12345)

Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144-152. [PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL | Zafira | Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat](#)

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Sumber Lainnya

BPS Kabupaten Rembang, ed. 2022. Kabupaten Rembang Dalam Angka 2022. ©BPS Kabupaten Rembang/BPS-Statistics of Rembang Regency.

